

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Alur Pemikiran.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	14
3. Kerangka Teoritis.....	21
F. Metode Penelitian.....	27
1. Pendekatan Masalah.....	27
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Teknik Analisis Data	33
G. Sistematika Penulisan.....	34
H. Orisinalitas	36
BAB II.....	
TINJAUAN PUSTAKA.....	

A. Tinjauan Umum Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39
1. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	39
2. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	42
3. Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45
4. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45
5. Saat Terhutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	47
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).....	49
1. Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	49
2. Jenis – Jenis Perjanjian Pengikatan Jual Beli	51
3. Bentuk – bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	53
4. Isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	55
5. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	56
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	59
BAB III.....	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penentuan Saat Terhutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Timbul dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Aspek Keadilan	63
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	63
2. Saat Terhutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).....	64
B. Implikasi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli dengan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94
1. Kedudukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	94
2. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebelum dan Sesudah di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	95
3. Implikasi Hukum dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	97

BAB IV	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	